

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Purwakarta, Januari 2024

Kepala Balai,



Ir. Iswari Ratna Astuti
NIP. 196911241995032001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.2 Belanja	
B.3 Belanja Pegawai	
B.4 Belanja Barang	
B.5 Belanja Modal	
B.6 Belanja Bantuan Sosial	
B.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TuntutanPerbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	
C.19 Tanah	
C.20 Tanah Belum Diregister	
C.21 Peralatan dan Mesin	
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
C.23 Gedung dan Bangunan	
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
C.27 Aset Tetap Lainnya	
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	

C.29	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	
C.32	Aset Tak Berwujud	
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	
C.34	Aset Lain-lain	
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	
C.42	Uang Muka dari KPPN	
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	
C.44	Ekuitas	
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2	Beban Pegawai	
D.3	Beban Persediaan	
D.4	Beban Barang dan Jasa	
D.5	Beban Pemeliharaan	
D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	40
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Purwakarta, Januari 2024

Kepala Balai,



[Handwritten Signature]
Iswari Ratna Astuti

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.28.922.360,- berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya senilai Rp.28.922.360,- atau mencapai 138 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp.21.000.000,-

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.6.276.009.725,- atau mencapai 99.12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.6.331.689.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2023 . Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan senilai Rp.11.849.875.928,- yang terdiri dari Aset Lancar senilai Rp.41.500,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.11.845.964.428,- dan Aset Lainnya (neto) senilai Rp.3.870.000,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing senilai Rp.0,- dan Rp.11.849.875.928,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.28.922.360,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah senilai Rp.6.523.225.761,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.6.494.303.401,-), Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar (Rp.13.511.250,-), dan Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO senilai (Rp.6.507.814.651,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 senilai Rp.12.110.603.214,- dikurangi Defisit-LO senilai (Rp.6.507.814.651,-), kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.0,- dan Transaksi Antar Entitas senilai Rp.6.247.087.365,-, adanya Kenaikan/penurunan Ekuitas senilai (Rp.260.727.286,-) sehingga Ekuitas entitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.11.849.875.928,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis aktual

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023
DAN 2022**

URAIAN	Catatan	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	21.000.000	28.922.360	138	77.499.644
JUMLAH PENDAPATAN		21.000.000	28.922.360	138	77.499.644
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	2.437.355.000	2.420.902.121	99.32	4.877.077.441
Belanja Barang	B.4	3.894.334.000	3.855.107.604	98.99	2.601.392.824
Belanja Modal	B.5				
Belanja Bantuan Sosial	B.6				
JUMLAH BELANJA		6.331.689.000	6.276.009.725	99.12	7.478.470.265

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

U R A I A N	Catatan	2023	2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Persediaan	C.2	41.500	148.500
Persediaan yang Belum Diregister	C.3	-	-
Jumlah Aset Lancar		41.500	148.500
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.16	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.18	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.19	8,962,232,000	8,962,232,000
Tanah Belum Diregister	C.20	-	-
Peralatan dan Mesin	C.21	8,761,521,140	8,729,850,140
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.22	-	-
Gedung dan Bangunan	C.23	5,940,954,000	5,940,954,000
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.24	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.25	1,431,867,000	1,431,867,000
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.26	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.27	107,898,000	107,898,000
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.28	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.29	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.30	(13,358,507,712)	(13,067,219,925)
Jumlah Aset Tetap		11,845,964,428	12,105,581,215
ASET LAINNYA			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.30	-	-
Aset Tak Berwujud	C.31	43,350,000	43,350,000
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.32	-	-
Aset Lain-lain	C.33	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.34	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.35	(39,480,000)	(295,846,250)
Jumlah Aset Lainnya		3,870,000	17,728,750
JUMLAH ASET		11,849,875,928	12,123,458,465
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.36	-	12,855,251
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.37	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.38	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.39	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.40	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.41	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.42	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	12,855,251
JUMLAH KEWAJIBAN		-	12,855,251
EKUITAS			
Ekuitas	C.43	11,849,875,928	12,110,603,214
JUMLAH EKUITAS		11,849,875,928	12,110,603,214
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		11,849,875,928	12,123,458,465

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	28,922,360	7,479,400
Jumlah Pendapatan		28,922,360	7,479,400
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	2,420,902,121	4,877,077,441
Beban Persediaan	D.3	36,069,000	44,585,000
Beban Barang dan Jasa	D.4	2,350,697,980	5,017,620,975
Beban Pemeliharaan	D.5	1,229,314,616	556,899,672
Beban Perjalanan Dinas	D.6	226,277,757	109,457,024
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	259,964,287	574,623,698
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Jumlah Beban		6,523,225,761	11,180,263,810
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(6,494,303,401)	(11,172,784,410)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.11	(13,511,250)	56,162,744
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.13	-	60,970,244
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.14	13,511,250	4,807,500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	-	9,050,000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(13,511,250)	65,212,744
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(6,507,814,651)	(11,107,571,666)
Pos Luar Biasa	D.16		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(6,507,814,651)	(11,107,571,666)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	12,110,603,214	12,683,191,529
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(6,507,814,651)	(11,107,571,666)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	6,247,087,365	10,517,685,621
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(260,727,286)	(589,886,045)
EKUITAS AKHIR	E.6	11,849,875,928	12,093,305,484

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan yang merupakan entitas pelaporan dari Politeknik Kelautan dan Perikanan Karawang. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak
 - i) tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5 %
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan. 2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikandengan:
 - * harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - * harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - * harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal sebanyak 6 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi kebijakan serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2023	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.000.000	21.000.000
Jumlah Pendapatan	21.000.000	21.000.000
Belanja		
Belanja Pegawai	3,447,681,000	2,437,355,000
Belanja Barang	3,894,334,000	3,894,334,000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	7,342,015,000	6,331,689,000

Realisasi
Pendapatan
Rp.28.922.
360,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah senilai Rp.28.922.360,- atau mencapai 138 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan senilai Rp.21.000.000,-. Pendapatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya senilai Rp.28.922.360,- dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	21.000.000	28.922.360	138
Jumlah	21.000.000	28.922.360	138

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	28.922.360	77.499.644	267,95
Jumlah	28.922.360	77.499.644	267,95

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

Daftar Rincian PNBP Lainnya TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2023
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi NonLitbang Lainnya	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	855.360
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	
Pendapatan Biaya Pendidikan	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	
Pendapatan Jasa Lainnya	
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	28.067.000
Jumlah	28.922.360

Realisasi Pendapatan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya ikan per 31 Desember 2023 terdiri dari :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) Rp.855.360,- merupakan atas pendapatan sewa rumah dinas oleh PNS selama 12 bulan dengan mekanisme pemotongan gaji via spm an. Ade Kusmayadi
- Pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi (425151) Rp.28.922.360,- merupakan pendapatan atas merupakan hasil dari Sewa alat riset oleh Mahasiswa yang melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan dasar aturan PP 85 tahun 2021.

Realisasi Belanja **B.2 Belanja**
Rp.6.276.009.000,-

Realisasi Belanja pada TA 2023 adalah senilai Rp.6.276.009.000,- atau 99.12 % dari anggaran belanja sebesar Rp.6.331.689.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2023

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2023		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	2,437,355,000	2,420,902,121	99.32
Belanja Barang	3,894,334,000	3,855,107,604	98.99
Belanja Modal			
Jumlah	6.331.689.000	6.276.009.000	99.12

Dibandingkan dengan TA 2022, Secara capaian serapan Realisasi Belanja TA 2023 mengalami Kenaikan senilai 0,61 persen. Berikut rincian realisasi belanja TA 2023 dan TA 2022.

Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022
Belanja Pegawai	2,420,902,121	4,877,077,441
Belanja Barang	3,855,107,604	2,601,392,824
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah	6,276,009,725	7,478,470,265

Realisasi
Belanja
Pegawai
Rp2.420.902
.121,-

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.420.902.000,- dan Rp.4.877.077.441. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Nilai Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 mengalami penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan terjadi adanya perpindahan mutasi pegawai sesuai dengan jabatan fungsional tertentu yang diembannya.

Daftar Rincian Belanja Pegawai Semester II TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2023
Belanja Gaji Pokok PNS	756,662,100
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,636
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	59,292,180
Belanja Tunj. Anak PNS	16,702,772
Belanja Tunj. Struktural PNS	20,580,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	93,174,000
Belanja Tunj. PPh PNS	2,505,400
Belanja Tunj. Beras PNS	46,421,220
Belanja Uang Makan PNS	103,607,000
Belanja Tunjangan Umum PNS	12,395,000
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	
Belanja Uang Lembur	164,141,000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	
Belanja Gaji Pokok PPPK	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	
Belanja Uang Makan PPPK	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kine	1,145,410,913
Jumlah Belanja kotor	2,420,902,221
Pengembalian Belanja Pegawai	100
Jumlah Belanja	2,420,902,121

Realisasi
Belanja
Barang
Rp.3.855.10
7.604,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.3.855.107.604,- dan Rp.2.601.392.824,-. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 148% dari Realisasi TA 2022.

Hal ini antara lain disebabkan oleh terjadi kenaikan belanja barang pada anggaran tahun anggaran. 2023 dibanding periode tahun sebelumnya dikarenakan besar pagu anggaran dan kegiatan yang kembali normal pasca Covid 19.

Daftar Rincian Belanja Barang TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2023
Belanja Barang Operasional	1,662,322,235
Belanja Barang Non Operasional	232,242,000
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,962,000
Belanja Jasa	480,855,055
Belanja Pemeliharaan	1,229,314,616
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	226,277,757
Jumlah Belanja Kotor	3,866,973,663
Pengembalian Belanja	11,866,059
Jumlah Belanja	3,855,107,604

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 0.00% dibandingkan TA 2022 disebabkan oleh tidak terdapat belanja modal pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA
2023 dan 2022*

Keterangan	TAHUN 2023	TAHUN 2022
-	-	-
Jumlah	-	-

*Penjelasan tentang Kas Di Bendahara
Pengeluaran :*

Merupakan uang muka dari KPPN

Persediaan
Rp.41.500

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp.41.500,- dan Rp.148.500,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Semester II TA 2023
dan 2022*

Jenis	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022
Barang Konsumsi	41.500	148.500
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Jumlah	41.500	148.500

Tanah
Rp.8.962.232.000

C.18 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp.8.962.232.000,- dan Rp.8.962.232.000,-. Nilai aset tetap Tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berasal dari nilai perolehan awal pada saat masih berstatus sebagai Aset tetap Tanah Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan senilai Rp.613.753.200,- dan telah dilakukan revaluasi aset senilai Rp.8.962.232.000,-. Mutasi nilai tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	8.962.232.000
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	8.962.232.000

Rincian saldo Tanah Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

*Rincian Tanah
Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2023*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	3.988 m2	Jl. Ipik Gandamanah Purwakarta Jawa Barat	8.962.232.000
Jumlah			8.962.232.000

Tanah seluas 3.988 m2 yang terletak di Jl. Ipik Gandamanah Purwakarta Jawa Barat, pada tanggal pelaporan per 30 Juni 2023, semua tanah telah bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian Kelautan dan Perikanan serta telah dilakukan Revaluasi Aset kembali dengan nomor Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN : 024/REV/WKN.08/KNL.04/2019 tanggal 25 November 2019 dengan nomor tiket IP-RV-20190718115112666360 (untuk \geq Rp.5 milyar) yang berupa tanah rumah negara golongan II. Sedangkan nomor tiket IP-RV-20190718115224011852 (berupa gedung dan bangunan) dan IP-RV-20190718135018027845 (berupa barang berlebih) sedangkan Revaluasi Aset sebelumnya dengan nomor Laporan Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN : 027/WKN.08/KNL.04/2017 tanggal 27 November 2017 oleh Tim Pelaksana Penilai Kembali Barang Milik Negara KPNL Purwakarta dan sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian nomor : BAR-027/IP/WKN.08/KML.04/2017 tanggal 27 November 2017. Adapun rincian tanah yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebagai berikut :

1. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan luas 2.263 m2 senilai Rp5.085.640.000,- (Sertifikat No. 00001, Kode Barang : 2010101002).
2. Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II dengan luas 1.725 m2 senilai Rp3.876.592.000,- (Sertifikat No. 00002, Kode Barang : 2010101002).

Peralatan dan
Mesin
Rp.8.761.521.1
40

C.19 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp.8.761.521.140 dan Rp.8.729.850.140.

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	8,729,850,140
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Transfer Masuk	31,671,000
	-
Mutasi kurang :	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	8,761,521,140

Kenaikan nilai saldo atas peralatan dan mesin tersebut merupakan atas adanya transfer masuk dari mutasi tambah disebabkan adanya transfer masuk dari Pusat Riset Perikanan dengan BAST Nomor B.2639/BRSDM.3/PL.750/XI/2023 tanggal 7 November 2023, yang berupa 1 unit Sice dengan nilai sebesar Rp9.000.000,00 dan BAST Nomor B.2639/BRSDM.3/PL.750/XI/2023 tanggal 7 November 2023 berupa:3 unit P C. Unit dengan nilai sebesar Rp22.671.000,00.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini

C.23 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai Rp.5.940.954.000,- dan Rp.5.940.954.000,-

Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan keterangan sebagai berikut :

- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan nomor : 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004 atas nama Kantor Loka Riset Pemacuan Stok Ikan Jatiluhur dengan luas bangunan : Bang. LT. I = 167,2 M² , Bang. LT II = 250,75 M² , Teras = 30 M² , Rabat = 30,5 M² , Septitank = 4,5 M² , yang didirikan diatas tanah seluas = 587,5 M² dari tanah seluas = 481,750 M² sesuai dengan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 3 an. Perusahaan Umum Otorita Jatiluhur (Sewa Menyewa), yang berlokasi di Jl. Cilalawi Tromol pos No. 1 Blok O Desa Jatimekar Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat Kode Pos 41152
- Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan nomor : 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001 untuk Mendirikan Bangunan Rumah Dinas dengan luas Bangunan : Bangunan = 1.718,21 M² , Teras = 241,30 M² , Rabat/Carport = 147,82 M² , Septitank = 84,00 M² yang didirikan diatas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai No. 1 dan 2 seluas = 4.425,00 M² YANG BERLOKASI DI Jalan Perumahan Munjul Jaya Permai RT 09 RW 02 Kelurahan Munjul Jaya Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat.
- Nomor Objek Pajak PBB : 32.16.010.006.002.0000-0 An. BRPSDI dengan Luasan 5.000 M².

Bangunan Gedung pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan terdiri atas:

1. Bangunan Gedung Kantor Permanen

Bangunan gedung kantor permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.3.854.200.000,-

Bangunan gedung kantor permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat 41152 IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

. Dan setiap tahun Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan membayar uang sewa atas pemanfaatan tanah tersebut senilai Rp.135.755.213 untuk tahun anggaran 2021 dengan nomor perjanjian sewa lahan nomor : SP-PLP.NP/01/GMPA.DKS/PH/01/2021 tanggal 01 Januari 2021 dan telah dibayarkan sesuai faktur tagihan Lahan nomor : 01-SPPL-F/GMPH.DPU/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 dan Nomor SP2D : 210211303000071 tanggal 08 Februari 2021.

2. Gedung Pos Jaga Permanen

Gedung pos jaga permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.6.609.000,-

Gedung pos jaga tersebut berada pada Kantor Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp6.609.000,- dengan IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

dan 1 unit dengan nilai Rp4.238.000,- berlokasi di Komplek Perumahan Perikanan yang berada di Jalan Ipik Gandamana RT/RW.09/02 Kelurahan Munjul Jaya Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat, dengan IMB Nomor: 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001.

3. Gedung Garasi/Pool Permanen

Gedung garasi/pool permanen pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.102.505.000,-

berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat 41152.

4. Rumah Negara

Rumah Negara pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 16 unit dengan nilai

Rp.1.688.528.000,-

Rumah Negara terdiri dari Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen, Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen, dan Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen. Rumah Negara tersebut berlokasi di Komplek Perumahan Perikanan yang berada di Jalan Ipik Gandamanah RT/RW.09/02 Kelurahan Munjul Jaya Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat, dengan IMB Nomor: 503/IMB.330-DTRB/2001 tanggal 16 November 2001.

5. Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan sebanyak 1 unit dengan nilai Rp.449.967.000,-

Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan berdiri diatas tanah Perum Jasa Tirta II (PJT II) Jalan Cilalawi No.2 Jatiluhur, Purwakarta-Jawa Barat. IMB Nomor: 503/IMB.410-DTRB/2004 tanggal 17 September 2004.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 31 Desember 2023 pada tanggal pelaporan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	5.940.954.000
Mutasi tambah:	
	-
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	5.940.054.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	5.940.054.000

Jalan, Irigasi
dan
Jaringan
Rp1.431.867.
000

C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 2023 dan 2022 adalah Rp.1.431.867.000 dan Rp.1.431.867.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	1.431.867.000
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per	1.431.867.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	-
Nilai Buku per	1.431.867.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap
Lainnya
Rp107.898.00
0

C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 2023 dan 2022 adalah Rp.107.898.000 dan Rp.107.898.000. Aset tetap tersebut berupa buku yang dimiliki Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan dengan jumlah sebanyak 65 buku yang tersimpan pada Perpustakaan milik Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan.

Aset tetap tersebut .Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2023	107.898.000
Mutasi tambah:	
	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2023	107.898.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	107.898.000

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(13,358,507,712)

C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 2023 dan 2022 adalah masing-masing (13,358,507,712) dan (13,067,219,925). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Kemitraan
Dengan Pihak
Ketiga Rp0

C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 3 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Tahun 2023

No	U r a i a n	Jumlah
-		-
-		-
-		-
-		-
	Jumlah	-

C.32 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 2023 dan 2022 adalah Rp43.350.000 dan Rp43.350.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan .

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud (ATB) pada Balai Riset Pemulihan Sumber Daya Ikan per 30 Juni 2023 berupa *Hak Paten Sederhana, Software Komputer*.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	43.350.000-
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	43.350.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	-
Nilai Buku per 31 Desember 2023	43.350.000

Aset Lain-lain
Rp0

C.34 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 2023 dan 2022 adalah Rp0 dan Rp270.225.000. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Mutasi atas Aset lain-lain adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai per 1 Januari 2023	270.255.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	
Mutasi Kurang:	
Penghapusan Aset	270.225.000
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2023	0
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2023	
Nilai Buku per 31 Desember 2023	0

Mutasi kurang tersebut disebabkan adanya penghapusan BMN dari neraca dengan SK Penghapusan No. 98/KEPMEN-KP/SJ/PL.750/2023 tanggal 22 Februari 2023 yang berupa 1 unit survey boat dengan nilai Rp.270.225.000,-.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp.39.480.000,-
)

C.35 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 2023 dan 2022 adalah (Rp39.480.000) dan (Rp295.846.250). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0

C.36 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp12.855.251. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejangka pelaporan.

Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp0

C.37 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

Utang yang Belum Ditagihkan berasal dari SPBy yang belum menjadi SPP.

Hibah Yang
Belum
Disahkan Rp0

C.39 Hibah Yang Belum Disahkan

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Jumlah
	-
	-
Jumlah	-

Penjelasan tentang Hibah Yang Belum Disahkan :

Utang
Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp0

C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan :

Pendapatan
Diterima
Dimuka Rp0

C.41 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A.2022
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Pendapatan Diterima Dimuka :

Uang Muka dari
KPPN Rp0

C.42 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
Total	-

Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0

C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp360,000. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut

Uraian	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A.2022
Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	-	360,000
	-	-
	-	-
Total	-	360,000

Penjelasan tentang Utang Jangka Pendek Lainnya :

-

Ekuitas
Rp11.849.875.
928

C.44 Ekuitas

Ekuitas per 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.11.849.875.928. dan Rp12.110.603.214 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. 45 Catatan Penting Lainnya neraca

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp28.922.360 dan Rp7.479.400. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 17.60. Hal tersebut disebabkan oleh Kenaikan pendapatan pada periode Semester II Tahun 2023 diperoleh dari penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan, penjualan hasil produksi non litbang lainnya, pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, serta pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tulus di banding dengan periode sebelumnya..

Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :

Pendapatan
Negara Bukan
Pajak
Rp28.922.360

URAIAN	REALISASI T.A. 2023
Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi NonLitbang Lainnya	
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	855.360
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	
Pendapatan Biaya Pendidikan	
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	
Pendapatan Anggaran Lain-lain	
Pendapatan Jasa Lainnya	
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	28.067.000
Jumlah	28.922.360

Beban
Pegawai
Rp2,420,902
,121

Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2,420,902,121 dan Rp4,877,077,441.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Beban Pegawai Semester II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2023
Belanja Gaji Pokok PNS	756,662,100
Belanja Pembulatan Gaji PNS	10,636
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	59,292,180
Belanja Tunj. Anak PNS	16,702,772
Belanja Tunj. Struktural PNS	20,580,000
Belanja Tunj. Fungsional PNS	93,174,000
Belanja Tunj. PPh PNS	2,505,400
Belanja Tunj. Beras PNS	46,421,220
Belanja Uang Makan PNS	103,607,000
Belanja Tunjangan Umum PNS	12,395,000
Belanja Tunjangan Profesi Dosen	
Belanja Uang Lembur	164,141,000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	
Belanja Gaji Pokok PPPK	
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	
Belanja Tunjangan Beras PPPK	
Belanja Uang Makan PPPK	
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kine	1,145,410,913
Jumlah Belanja kotor	2,420,902,221
Pengembalian Belanja Pegawai	100
Jumlah Belanja	2,420,902,121

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp36.069.000 dan Rp44,585,000

Beban
Persediaan
Rp36,069,000

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2023
Beban Persediaan konsumsi	35.962.000
Beban Persediaan bahan baku	
Beban Persediaan Lainnya	107.000
Jumlah Beban Persediaan	36.069.000

Beban Barang
dan Jasa
Rp2.350.697.980

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp6,532,978,594 dan Rp6,283,737,197.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh terjadi kenaikan beban belanja barang Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya, adapun belanja terkait penanganan Covid 19 Tahun 2023.

Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023
Beban Keperluan Perkantoran	1,493,298,390
Beban Pengadaan Bahan Makanan	
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	79,200,000
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	577,845
Beban Bahan	61,826,000
Beban Honor Output Kegiatan	8,160,000
Beban Barang Operasional Lainnya	89,246,000
Beban Langganan Listrik	136,129,235
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	23,804,689
Beban Sewa	104,947,751
Beban Jasa Profesi	1,800,000
Beban Jasa Lainnya	203,604,880
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	162,256,000

Beban
Pemeliharaan
Rp1,229,314,616

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,229,314,616 dan Rp556,899,672

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 120.74 persen dibandingkan dengan Tahun 2022 disebabkan oleh terjadi kenaikan beban pemeliharaan pada Tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya pada semua beban pemeliharaan dikarenakan banyaknya bangunan yang mengalami kerusakan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	306,746,000
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295,547,000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	627,021,616
Jumlah	1.229.314.616

Beban Perjalanan
Dinas Rp
226,277,757

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.226.277.757 dan Rp.109,457,024

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 mengalami kenaikan disebabkan oleh Kenaikan beban perjalanan dinas dikarenakan bertambahnya intensitas perjalanan dinas akibat dari normalisasi kegiatan pasca covid 19 pada tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya.. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2023
Beban Perjalanan Biasa	226.277.757
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-
Jumlah	226.277.757

Beban Barang Untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat
Rp0

D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Bantuan Sosial Rp0

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 100.00 disebabkan oleh Tidak terdapat beban bantuan sosial untuk pemberdayaan dalam bentuk barang/jasa pada periode Semester II Tahun 2023 dibandingkan Tahun sebelumnya dikarenakan adanya kesalahan pencatatan kode akun pada modul komitmen.. Rincian Tahun 2023 dan

Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang/Jasa	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp259.964.287

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp259.964.287 dan Rp574.623.698.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023

URAIAN	REALISASI T.A.2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	219,296,790
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	33,306,371
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	7,013,626
Beban Penyusutan Irigasi	
Beban Penyusutan Jaringan	
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-
Jumah Penyusutan	259.616.787
Beban Amortisasi Paten	347.500
Jumlah Amortisasi	347.500
Jumlah	259.964.287

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus
(Defisit)
Penjualan Aset
Non Lancar
Rp0

D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester II TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit)
dari Kegiatan Non
Operasional
Lainnya
(Rp.13,511,250)

D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing senilai (Rp13.511.250) dan Rp- 65.212.744.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-
Beban Pelepasan Aset non lancar	13.511.250
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	-
Jumlah	13.511.250

Pos Luar Biasa
Rp0

D.14 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Semester II 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2023	REALISASI T.A. 2022	%
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp12,110,603,214

E. 1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.12.110.603.214 dan Rp.12.683.191.529

Defisit LO

(6,507,814,651)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar (Rp6,507,814,651) dan (Rp.11,107,571,666). Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan

dan Mendasar

Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.-203,035,796 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian

Nilai Aset Rp.0.00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0.00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0.00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atas atas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih
Revaluasi Aset
Rp.0.00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0.00 dan Rp.0.00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2023

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non
Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2023

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-
Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2023

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar
Entitas
Rp6,247,087,365

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp. 6,247,087,365 dan Rp. 10,517,685,621. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2023

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	6,276,009,725
Diterima dari Entitas Lain	(28,922,360)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	6.247.087.365

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DKEL sebesar Rp 6,276,009,725, sedangkan DDEL sebesar Rp28,922,360

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitaslain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2023

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2023

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2023 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp127,361,31
9,101*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesarRp. 11,849,875,928dan Rp. 12,093,305,484.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

A. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada pengungkapan.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Tidak ada pengungkapan.